

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers., 2011
- Astawa, Pantja, Gede, I, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2013
- Azhar, *Negara Hukum Indonesia*. UI-Press. Jakarta, 1995
- Aziz, Noor, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009
- Badoh, Ibrahim Z Fahmi dan Abdullah Dahlan, 2010, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Budiardjo, M., *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012
- Departemen Pendidikan Naisona, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. II Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Eko Prasoj, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguh Kurniawan, *Desentralisasi & Pemerintahan daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006,
- Harsanto Nursadi, *Pemerintah(an) Daerah dalam Konstitusi*, Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
- Huda, Ni'matul. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca – Reformasi*. Jakarta : KENCANA, 2017
- J. Kaloh, *Kepimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, Perilaku Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016

- Kusnardi, Moh. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Pusat : Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2016
- Luki S.A, Syamsuddin, dkk. *Evealuasi Pemilu Legislatif 2014 : Analisi Proses dan Hasil*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016
- Mahfud M.D, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2016
- Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung : Mandar Maju, 1993
- Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Prima Grafika, 2013
- Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012
- Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Penerbit Gramata Publishing, 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001
- Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2018
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013

#### **JURNAL / ARTIKEL ILMIAH**

- Affan Sulaeman, “Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilihan Kepala”, artikel dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan D CosmoGov, Vol.1 No.1*, April 2015
- Agus Hadiawan, “Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung)”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Volume 3, Nomor 7 Juli-Desember 2009*
- Alkostar, Artidjo, 2009, “Korelasi Korupsi politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (telaah tentang Praktik korupsi Politik dan

Penanggulangannya)", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, Edisi Khusus, Oktober, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Andryan, A., & Kodiya, B. A. "Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2),2020

Cahyani,R.P, "Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Dimensi Hak Asasi Manusia (Studi Penelitian Tentang Kasus Setya Novanto)", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti 1.1*, 2019

Dewi,Indar, "Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah)" *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019

Fahmi, Khairul, 2019, "Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil dan Berintegritas", *Disertasi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*

Fariz Donal, "Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020

Hanum Hapsari, "Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif", *Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018*

Idris, Tiyas Tinovi, "Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 (Kasus Kelurahan Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir)", *Jom FISIP Universitas Riau*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014

Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interkasi Manusia" *Jurnal Literasi Hukum* 3.2, 2019,

Janedjri M Gaffar," Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelegaraan Pemilu". *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, 2013

Khairul Fahmi, "Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil dan Berintegritas", *Disertasi Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, 2019

M. Noor Aziz, "Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Perpustakaan Hukum Badan Pembina Hukum Nasional Tahun 2011*

M. Holy One N., "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/Puu-Xvii/2019 Tentang Norma Hak Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Bagi Mantan Terpidana Ditinjau Dari Aspek Pemidanaan", *Jurnal Humani Volume 11 Nomor 1*, 2021

Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta:Rajawali Pers,2011

Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat", *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3*, 2014. hlm.270.

Muwahid, "Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Di Jawa Timur", *Jurnal al-Daulah Volume 10 Nomor 1*, 2020

Muzayanah, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Volume 6 Nomor 2*, Agustus 2020

Pebrianti Siti,"Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu*, 2022

Singadimedja, Ida R., "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/Puu-Xvii/2019 Tentang Norma Hak Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Bagi Mantan Terpidana Ditinjau Dari Aspek Pemidanaan", *Jurnal Humani Volume 11 No. 1 Mei 2021 Halaman 101-119*

Surahman Amin dan Ferry M Siregar, "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qura'an", *Studi AlQuran*, No. 1 (Oktober 2015)

Telly Sumbu, dkk, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010

Warih Anjari, "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014)", *Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015*

Yuliana, Lukman, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum", *Jurnal Tomalebbi Online Journal System Universitas Negeri Makassar, Volume 1, Nomor 2*, September 2014

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

### **Internet**

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16124&menu=2#>

[www.acch.kpk.go.id](http://www.acch.kpk.go.id)

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44644077>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/10150891/langkahkpu-larang-mantan-napi-korupsi-jadi-caleg-terganjalpemerintah?page=all>

<http://www.pemilu.kpu.go.id/index/php?option=com/content&taskview32itemid62.html>

<https://kbbi.web.id/>

<https://www.antikorupsi.org/id/article/mahkamah-konstitusi-larang-koruptor-maju-pilkada>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aldi Ferdiansyah  
NPM : 5118500094  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 26 September 1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal  
Timur Kota Tegal  
Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD N Mangkukusuman 2 Tegal	2005	2011
2	SMP N 9 Tegal	2011	2014
3	SMK N 1 Adiwerna	2014	2017
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2018	2024

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 30 Januari 2024

Hormat Saya,

Aldi Ferdiansyah